

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia dilahirkan di dunia tentu tidak selamanya sempurna secara jasmani maupun rohani. Beberapa orang mengalami kesulitan seperti gangguan bicara, gangguan pendengaran, keterbatasan mental, dan lain sebagainya. Selain itu, ada sebagian yang terlahir dengan menderita kekurangan fisik atau mental akibat genetik hingga sebuah peristiwa seperti kecelakaan dan bencana alam. Hal ini menyebabkan beberapa orang memiliki kehidupan yang terbatas dan tidak berdaya, baik secara pribadi maupun dalam kehidupan masyarakat. Namun setiap manusia yang terlahir tersebut berhak memenuhi kebutuhan hidup selayaknya manusia lain yang terlahir secara jasmani dan rohani yang sempurna. Pada umumnya masyarakat mengharapkan kondisi hidup yang sempurna. Dalam hal ini kehidupan yang segala kebutuhannya terpenuhi dan tidak mengalami ketakutan hidup akan masa depan, serta kehidupan yang mewujudkan hubungan dengan keadilan.¹

Pada umumnya setiap orang mempunyai hak asasi manusia, tidak hanya manusia normal, tapi setiap manusia yang memiliki kebutuhan khusus atau kelompok disabilitas juga memiliki hak dan kewajiban yang setara. Hal tersebut dinyatakan dalam UU No. 4 tahun 1997 Pasal 1 Bab 1 dan Undang-undang No. 8 tahun 2016 yang menjelaskan bahwa seluruh warga Negara mendapatkan perlindungan tanpa harus membedakan warga negaranya, hal ini karena hak perlindungan tersebut di dapatkan semua warga Negara tanpa membeda-bedakan, seperti masyarakat penyandang disabilitas yang juga mendapatkan perlindungan dari Negara. Dengan demikian menjelaskan bahwasannya hak asasi manusia bersifat menyeluruh bagi warga Negara Indonesia.²

Keadaan terbatas yang dimiliki para penyandang disabilitas membuat mereka merasa minder atau rendah diri ketika berada di lingkungan sosial, padahal mereka termasuk bagian dari masyarakat yang memiliki hak untuk berpartisipasi. Namun sebagian orang seringkali mengecapnya sebagai penyandang cacat sehingga hal ini menimbulkan perasaan yang tidak aman bagi mereka. Sehingga

¹ Ledia Hanifa Amalia, *Dari Disabilitas Pembangunan Menuju Pembangunan Disabilitas*, (Jakarta: beebooks, 2016), 8

² Metra Naibaho, *Program Rehabilitas Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Di Panti Sosial Bina Daksa Budi Perkasa Palembang*, PROSIDING KS: RISET & PKM, Vol. 2 No. 3, 2019. 331-332

penggunaan istilah penyandang cacat dihapuskan karena berkonotasi negatif dan menyatakan bahwa individu yang secara sosial tidak dapat diberdayakan. Oleh sebab itu, dianjurkan untuk lebih sering menggunakan istilah disabilitas atau difabel di kalangan masyarakat.

Berdasarkan perspektif islam mengenai topik permasalahan fisik, dalam firman Al-Qur'an bahwasannya Allah SWT telah menekankan penciptaan manusia yang diciptakan dalam keadaan yang sebaik mungkin dan selayaknya. Allah SWT berfirman :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

Artinya : “Sungguh, Kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya.” (Q.S. At-Tin ayat 4).³

Faktanya, keadaan penyandang disabilitas terkadang belum bisa diterima di lingkungan masyarakat. Akibatnya, hak dan kebutuhannya sering diabaikan karena keterbatasan yang dimiliki. Masyarakat menganggap mereka sebagai individu-individu yang lemah dan kurang berakal yang memerlukan bantuan orang lain. Agar hak atau wewenang mereka tetap hidup hingga hak atas pendidikan, perawatan kebugaran, dan akses sederhana seperti fasilitas umum yang harus terpenuhi. Hal tersebut ditinjau dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi, “seperangkat hak yang menyertai keberadaan kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Keistimewaan ini adalah anugerah-Nya, yang wajib dipelihara, dan dijaga oleh Negara, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.”⁴ Hal ini menyebabkan mereka masuk dalam kategori miskin karena hak yang tidak terpenuhi tersebut dipengaruhi oleh faktor struktural yang mengarah pada akses kemiskinan.

Kondisi penyandang disabilitas ini juga menimbulkan dampak pada kemampuannya untuk berpartisipasi di dalam masyarakat. Keberadaan yang termarginalkan sehingga membutuhkan dukungan, perlindungan, dan perhatian dari masyarakat. Dengan tujuan memberikan wadah dan sarana yang memadai untuk pengembangan kemampuan berpikir, sehingga penyandang disabilitas mampu menimbang berbagai kebutuhan mereka serta menyusun rencana pemenuhannya secara rasional. Dengan begitu mereka mempunyai rasa kepercayaan diri untuk menjadi berdaya, hidup mandiri, dan

³ Kemenag, *Al-Qur'an Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia QS. 95:4*

⁴ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia*, UU No. 39 Tahun 1999

mampu bersosial di tengah masyarakat, serta mampu memenuhi kebutuhan perekonomiannya.⁵

Sebenarnya penyandang disabilitas memiliki kemampuan dan potensi yang dapat dikembangkan guna menjadi modal dalam meningkatkan taraf hidupnya sendiri, oleh karena itu perlu adanya pemberdayaan untuk mengatasi permasalahan yang dialami kelompok disabilitas. Dra. Arni Surwanti, M.Si dalam penelitiannya model pemberdayaan penyandang disabilitas di Indonesia mengemukakan beberapa sifat dari isu permasalahan kelompok disabilitas yang berkenaan dengan kehidupan dan kesejahteraannya, antara lain:

1. Berasal dari keluarga dengan tingkat sosial ekonomi dan kesehatan yang rendah;
2. Mayoritas bertempat tinggal di daerah pedesaan (*Rural Area*);
3. Rendahnya tingkat pendidikan;
4. Rendahnya produktivitas sumber daya manusia penyandang disabilitas yang disebabkan karena kurangnya program pelatihan;
5. Tekanan masalah psikologis yang dihadapi seperti, rasa trauma, rendah diri, kurangnya percaya diri, dan ketakutan;
6. Adanya persoalan hambatan sosial (*social and cultural barriers*), ialah perlakuan diskriminasi di lingkungan keluarga dan masyarakat. Kemudian, keterbatasan aksesibilitas (*architectural barriers*) seperti, kurangnya fasilitas publik yang mendukung;
7. Minimnya akses modal yang mendukung
8. Kemampuan yang rendah dalam bidang *marketing* usaha.⁶

Situasi yang begitu kompleks, berbagai permasalahan sosial penyandang disabilitas memerlukan keterlibatan berbagai pihak untuk mengatasinya. Oleh karena itu sangat dibutuhkan adanya suatu lembaga khusus untuk memberdayakan kelompok disabilitas. Dengan tujuan agar para kelompok difabel mampu memenuhi taraf kehidupannya dengan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka dengan diberikan pelatihan keterampilan atau *skill* bagi setiap kelompok disabilitas. Selain itu, dalam proses kegiatan pemberdayaan membutuhkan adanya partisipasi dari anggota komunitas hingga masyarakat. Karena pemberdayaan dan partisipasi adalah dua hal yang penting dari suatu pengembangan masyarakat agar dapat tercapai. Dengan demikian, kegiatan pemberdayaan oleh komunitas ini menjadi

⁵ Akhmad Faozan, *Pemberdayaan Ekonomi Difabel Perspektif Maqasid Syari'ah (Studi Kasus pada UD Mutiara Handycraft Karang Sari Buayan Kebumen Jawa Tengah)*, IAIN Purwokerto. 37

⁶ Arni Surwanti & Hindasah, L., *Model Pemberdayaan Ekonomi Penyandang Disabilitas di Indonesia (Working Paper)*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2013. h.2

awal dari proses partisipasi anggota komunitas dan masyarakat dalam meningkatkan kemandirian melalui pengambilan keputusan sehingga mereka terbiasa dan mampu bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang telah dipilih.⁷

Berdasarkan hal tersebut peran suatu pihak dan komunitas pun dirasa penting dalam menyelesaikan setiap masalah yang dialami oleh para penyandang disabilitas. Salah satu komunitas yang bergerak dan menaungi para penyandang disabilitas adalah Forum Komunikasi Disabilitas Kudus (FKDK). Forum Komunikasi Disabilitas Kudus merupakan suatu organisasi bukan pemerintah yang bersifat independen, nirlaba, dan bukan partisan. Organisasi ini merupakan satu-satunya komunitas yang sudah diakui pemerintah sebagai komunitas resmi penyandang disabilitas di Kabupaten Kudus. Forum Komunikasi Disabilitas Kudus hadir sebagai komunitas untuk mewujudkan kesetaraan dan inklusi. Dimana komunitas tersebut memiliki cita-cita besar dalam memperjuangkan hak-hak difabel di Kabupaten Kudus agar dapat di akselerasi dengan baik.

Forum Komunikasi Disabilitas Kudus terus berupaya mendorong para anggotanya untuk lebih maju di lingkungan sosial masyarakat. Misi yang diterapkan oleh FKDK yakni mewujudkan kehidupan penyandang disabilitas yang mandiri dan revolusi menuju masyarakat inklusif. FKDK sebagai sarana utama gerakan komunitas difabel yang bermartabat, progresif, dan kreatif dengan melakukan pendekatan pemberdayaan dari tahapan strategi awal hingga implementasi.

Pemberdayaan tersebut perlu dilakukan sebagai proses pengembangan kemandirian bagi sekelompok masyarakat dengan diberikan sebuah *skill* atau keahlian yang kedepannya akan berguna untuk mengembangkan diri dalam aspek ekonomi dan sosial secara mandiri. Kemandirian disini diartikan sebagai suatu kondisi masyarakat dengan kemampuan berpikir, memutuskan, dan melaksanakan sesuatu yang dianggap tepat guna dengan menggunakan keahlian yang dimiliki untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, serta pencapaian dalam kemandirian yang tentunya harus memerlukan proses belajar. Pelaksanaan pemberdayaan dibutuhkan oleh masyarakat yang memiliki kondisi lemah, tidak memiliki kapasitas atau daya, sehingga menjadi terpinggirkan dalam keterbelakangan di lingkungan masyarakat sosial dan ekonomi bagi kelompok disabilitas. Kemandirian tersebut dapat dinyatakan unggul

⁷ Ferdian Tonny Nasdian, *Pengembangan Masyarakat*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014). 95

dan berhasil jika penyandang disabilitas diberdayakan baik dalam aspek ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, pemberdayaan ekonomi menjadi salah satu cara yang penting agar kemandirian penyandang disabilitas tercapai.

Oleh karena itu FKDK mengupayakan suatu pemberdayaan dalam bentuk program kegiatan yang memberikan pelatihan keterampilan kerja terhadap kelompok disabilitas. Pemberdayaan tersebut diimplementasikan dalam program yang diberi nama KUBE (Kelompok Usaha Bersama). Program KUBE bagi penyandang disabilitas ini bertujuan untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, bertujuan untuk membantu perubahan dari masyarakat yang tidak berdaya menjadi masyarakat yang memiliki kehidupan yang baik dan berdaya. Untuk itu mereka diberikan program pelatihan sesuai dengan potensinya untuk bisa meningkatkan dan membangun usaha agar lebih mandiri dan memiliki penghasilan sendiri. Adapun bentuk pelatihan kegiatan yang ada pada KUBE diantaranya, pelatihan tata boga, pelatihan menjahit, pelatihan komputer, dan pelatihan *digital marketing*. Selanjutnya, para penyandang disabilitas juga diberikan kegiatan konseling dan motivasi.

Akan tetapi berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan beberapa informan di FKDK yang melaksanakan program kegiatan tentunya tidak lepas dari suatu permasalahan yang menghambat sehingga dalam pelaksanaannya para anggota belum secara maksimal berperan aktif terhadap program yang dijalankan. Masalah umum yang dirasakan di Forum Komunikasi Disabilitas Kudus pada umumnya adalah strategi program KUBE yang diterapkan selama ini belum sepenuhnya menyentuh pada apa yang menjadi kebutuhan seluruh anggota disabilitas (*needs*). Sehingga partisipasi anggota menjadi kurang aktif dan pelaksanaan program dijalankan hanya sebagai formalitas saja. Permasalahan ini juga menyebabkan beberapa anggota disabilitas menjadi alumni dan tidak lagi bergabung di FKDK. Berdasarkan informasi dari alumni FKDK menyebutkan karena mereka bosan dan kurang cocok dengan program kegiatan yang diberikan. Sehingga selama menjalankan pelatihan mereka tidak menjalankannya dengan sungguh-sungguh. Kemudian mereka yang menjadi alumni menyebutkan bahwa penghasilan yang didapatkan kurang memuaskan.

Adapun masalah yang dihadapi dalam program pemberdayaan di FKDK adalah terbatasnya anggaran yang menjadi salah satu kendala-kendala yang didapat dari proses pemberdayaan. Untuk mendapatkan sumber dana anggaran yang besar pihak FKDK

diharuskan mengajukan proposal ke Pemerintah Pusat untuk mendapatkan bantuan dana. Oleh sebab itu, berdasarkan permasalahan tersebut peneliti ingin mengkaji lebih dalam lagi mengenai program kegiatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Forum Komunikasi Disabilitas Kudus dalam memenuhi upaya memberdayakan kelompok disabilitas. Peneliti mengambil fokus tentang Evaluasi Program Pemberdayaan Disabilitas Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Forum Komunikasi Disabilitas Kudus.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada pembahasan penelitian skripsi ini menjelaskan tentang pembahasan mengenai bentuk pemberdayaan melalui program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan kemandirian terhadap penyandang disabilitas. Dimana pembahasan ini difokuskan pada Evaluasi Program Pemberdayaan Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Forum Komunikasi Disabilitas Kudus.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini sebagaimana berikut:

1. Apa saja masalah yang dihadapi dalam program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)?
2. Bagaimana tingkat keberhasilan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebagai pemberdayaan kelompok disabilitas di Forum Komunikasi Disabilitas Kudus?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dikemukakan diatas, maka penelitian ini bisa dikatakan memiliki tujuan sebagai jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan, antara lain:

1. Untuk mengetahui masalah yang dihadapi dalam program Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
2. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebagai pemberdayaan kelompok disabilitas di Forum Komunikasi Disabilitas Kudus.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang sudah dipaparkan, hasil penelitian ini mampu memberikan nilai kemanfaatan bagi berbagai pihak yang memiliki kepentingan teoritis maupun praktis. Manfaat dari penelitian tersebut sebagaimana berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan referensi dalam bidang pemberdayaan yang berkaitan dengan suatu bentuk program pelatihan dalam upaya meningkatkan kemandirian kelompok disabilitas.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pembaca dan peneliti lainnya yang berkaitan dengan pemberdayaan kelompok disabilitas melalui suatu program pelatihan keterampilan dalam upaya meningkatkan kemandirian. Dan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan penelitian berikutnya dengan menambahkan variabel permasalahan lainnya yang sesuai dengan tema penelitian, serta pengembangan penelitian lebih lanjut.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi suatu lembaga atau komunitas terkait dalam menangani permasalahan kelompok disabilitas untuk terus berusaha dan berupaya dalam menciptakan pemberdayaan terhadap kelompok disabilitas yang independen dan terus berkembang. Selain itu dapat menjadi bahan dalam penyusunan kebijakan dalam memberdayakan para penyandang disabilitas.

F. Sistematika Penulisan

Tujuan dari sistematika penulisan ini yaitu untuk mendapatkan gambaran mengenai komponen terkait sehingga akan didapatkan penelitian yang ilmiah dan sistematis. Sistematika dari penulisan penelitian ini, antara lain:

1. Bagian Awal

Bagian awal ini terdiri : halaman judul, halaman pengesahan skripsi, halaman persetujuan pembimbing skripsi, halaman persembahan, kata pengantar, halaman daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar.

2. Bagian Isi

Bagian isi terdiri dari penjelasan mengenai lima bab utama yang digunakan dalam menjelaskan inti dari penelitian, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah skripsi, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KERANGKA TEORI

Bab ini berisi uraian teori-teori yang menjadi landasan penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul

penelitian. Beberapa teori ini didapatkan dari hasil studi pustaka beberapa literatur. Serta bab ini berisi tentang penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan jenis dan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian, *setting* penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang data dan hasil temuan lapangan dengan segala persoalan yang diperoleh selama melaksanakan penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bagian ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang diberikan kepada subjek penelitian. Di akhir penulisan peneliti memasukkan daftar pustaka dan lampiran-lampirannya.

